

**AKSI HAM TAHUN 2018  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA**

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Harmonisasi produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya hasil harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif Hak Asasi Manusia	<b>2018</b> <b>B04:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Rancangan Produk Hukum yang akan diharmonisasi (tahun berjalan)</li> <li>Terlaksananya pertemuan (rakor/fgd) pembahasan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM</li> </ol> <b>B06:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Rancangan Produk Hukum yang akan</li> <li>Diharmonisasi (tahun berjalan)</li> <li>Terlaksananya pertemuan (rakor/fgd) pembahasan harmonisasi rancangan produk</li> </ol>		<b>2018</b> <b>B04:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scan rancangan produk hukum yang akan diharmonisasi</li> <li>Laporan hasil pertemuan (notulensi/rekomendasi)</li> </ol> <b>B06:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scan rancangan produk hukum yang akan diharmonisasi</li> <li>Laporan hasil Pertemuan (notulensi/rekomendasi)</li> </ol>

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
						B04	B06	B09	B12		
	1	2	3	4	5	6				7	8
						<p>hukum daerah dari perspektif HAM</p> <p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Rancangan Produk Hukum yang akan diharmonisasi (tahun berjalan)</li> <li>Terlaksananya pertemuan pembahasan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM</li> </ol> <p><b>B12:</b></p> <p>Hasil harmonisasi rancangan produk hukum dari perspektif HAM</p>				<p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scan rancangan produk hukum yang akan diharmonisasi</li> <li>Laporan hasil pertemuan</li> </ol> <p><b>B12:</b></p> <p>Scan rancangan produk hukum yang telah diharmonisasi</p>	
2	Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah	Pemerintah Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas,	Meningkatnya jumlah guru di daerah	Tersedianya identifikasi kebutuhan guru di daerah	<p><b>2018</b></p> <p><b>B04:</b></p> <p>Inventarisasi jumlah sekolah, murid, dan kualifikasi guru (yang telah ada dan yang diperlukan) di tingkat SD, SLTP atau yang sederajat</p>				<p><b>2018</b></p> <p><b>B04:</b></p> <p>Rekap data jumlah sekolah, murid, dan kualifikasi guru (yang telah ada dan yang diperlukan) di tingkat SD, SLTP atau yang sederajat</p>	